

ABSTRAK

KEPENTINGAN INDONESIA DALAM KEBIJAKAN EKSPOR NIKEL DI ERA PEMERINTAHAN JOKO WIDODO PERIODE 2020-2024

Oleh

Ahmad Rifa'i Arief

Penelitian ini menganalisis kepentingan Indonesia dalam kebijakan ekspor nikel selama periode pemerintahan Joko Widodo (2020–2024), dengan fokus pada pelarangan ekspor bijih nikel mentah untuk mendorong hilirisasi industri. Sebagai pemilik 54% cadangan nikel global, Indonesia bertujuan meningkatkan nilai tambah ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan mengurangi ketergantungan pada ekspor bahan mentah. Penelitian kualitatif dengan pendekatan studi literatur dan analisis data sekunder menunjukkan bahwa kebijakan ini berhasil meningkatkan nilai ekspor produk hilir nikel dari USD 1,2 miliar (2019) menjadi USD 45 miliar (2024), menarik investasi asing senilai USD 35 miliar, serta menciptakan 48.000 lapangan kerja langsung. Namun, tantangan seperti gugatan Uni Eropa di WTO, dominasi investasi asing (terutama China), dan ketergantungan teknologi mengancam keberlanjutan kebijakan. Melalui perspektif teori kepentingan nasional (Keohane) dan hilirisasi (List), peneliti menyimpulkan bahwa kepentingan Indonesia dalam kebijakan larangan ekspor nikel adalah untuk meningkatkan lapangan pekerjaan, meningkatkan nilai tambah ekonomi, dan transfer teknologi asing. Rekomendasi mencakup peningkatan anggaran riset, reformasi regulasi ketenagakerjaan, serta diversifikasi kerja sama internasional.

Kata Kunci: Hilirisasi, Investasi Asing, Kebijakan Ekspor Nikel, Kepentingan Nasional, Transfer Teknologi.

ABSTRACT

INDONESIA'S INTERESTS IN NICKEL EXPORT POLICY IN THE ERA OF JOKO WIDODO'S GOVERNMENT 2020-2024 PERIOD

By

Ahmad Rifa'i Arief

This study examines Indonesia's interests in restricting raw nickel ore exports under President Joko Widodo's administration (2020–2024) to advance industrial downstreaming. As the world's largest nickel reserve holder (54% of global reserves), Indonesia seeks to enhance economic value-added, reduce raw material dependency, and generate employment. Using qualitative methods with secondary data analysis, the research finds that the policy increased processed nickel exports from USD 1.2 billion (2019) to USD 45 billion (2024), attracted USD 35 billion in foreign investment, and created 48,000 direct jobs. However, challenges such as the EU's WTO dispute, Chinese investment dominance, and technological reliance threaten long-term sustainability. Through Keohane's national interest theory and List's downstreaming framework, the study concludes that Indonesia's interests in the nickel export ban policy are to increase employment, increase economic added value, and transfer foreign technology.. Recommendations emphasize R&D funding, labor regulation reforms, and diversified international partnerships.

Keywords: Downstreaming, Foreign Investment, National Interest, Nickel Export Policy, Technology Transfer.